

## DAFTAR PUSAKA

### A. Buku

- A.Mukthie Fajar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat, Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006.
- Aninymous, *Undang-Undang Pemilu & Partai Politik 2008*, Gradien Mediatama, Yogyakarta, 2008
- Anonimous, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta 2010
- Azed Abdul Bari, *Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, Badan Penerbit FH UI, Jakarta, 2000
- Jimly Asshiddiqie, Ali safa'at M., *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Setjen dan Kepaniteraan MK RI (cetakan I), Jakarta, 2006
- Jimly Asshiddiqie, Bagir Manan dkk., *Gagasan Amandemen UUD 1945 Dan Pemilihan Presiden Secara Langsung*, Setjen dan Kepaniteraan MK RI (cetakan II), Jakarta, 2006
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI (cetakan I), Jakarta, 2006
- , *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi press (cetakan III), Jakarta, 2006
- , *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- , *Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Setjen dan Kepaniteraan MK RI (cetakan II), Jakarta, 2006
- , *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2*, Setjen dan Kepaniteraan MK RI (cetakan I), Jakarta, 2006
- , *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan MahkamahKonstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah KonstitusiRI,2006
- , *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, PSHTN FHUI, Jakarta, 2004

- , *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Perpustakaan Nasional RI (cetakan I), Jakarta 2005
- , *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, Setjen Kepaniteraan MK RI, Jakarta 2009
- Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi Sistem Dan Problem Penerapan Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993
- LutfiMustafa, *Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2010
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis Fungsi Dan Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008
- Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, *Teori Dan Pengujian Perundang-Undangan*, Nusa Media, Bandung, 2011.
- Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, FH UII Press, Yogyakarta, 2005.
- , *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia dalam Putusan MahkamahKonstitusi*, FHUII Press, Yogyakarta, 2011.
- Romi Librayanto, *Ilmu Negara (Suatu Pengantar)*, Arus timur, Jakarta, 2013
- Santoso, Topo & Didik Supriyanto, *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*, PTRaja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001
- Taufiqurrahman Syahuri, *Tafsir Konstitusi berbagai Aspek Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011
- , *Hukum Konstitusi (Proses dan Prosedur Perubahan UUD1945 di Indonesia 1945-2002)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004

Ubaedillah, Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, Ham dan Masyarakat Madani*, Kencana, Jakarta, 2012

-----, *Pendidikan Kewarganegaraan*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2006.

Willy D.S Voll, *Negara Hukum dalam Keadaan Pengecualian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656)

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914)

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3809)

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316)

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076)

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)

Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang cara kerja Komisi Pemilihan Umum, dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor: 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota

Republik Indonesia, Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 Tentang Sumber Tertib Hukum Menentukan Hirarki

Republik Indonesia, Ketetapan MPR No.III/MPR/2000 Tentang Tata Urutan (Hirarki) Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum

Republik Indonesia, Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Referendum

Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah

Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan wakil Presiden

Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal

### **C. Jurnal dan Majalah**

Fadjar A. Mukhtie, *“Pemilu Yang Demokratis Dan Berkualitas: Peyelelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu Dan PHPU”*, Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, Edisi April 2009

Farahdiba Rahma Bachtiar, *“Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi”*, Jurnal Politik Profetik, Volume 3 Nomor 1, Edisi 2014

Feby Settiyo Susilo Supatno, *“Pemilukada Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Dengan Perubahan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015”*, Lex Privatum, Volume IV Nomor 2, Edisi Februari 2016

Hani Adhani, *“Sengketa Pilkada Pasangan Calon Tunggal”*, Opini Majalah Konstitusi Nomor 105, Edisi November 2015

Hardiyanto, Suharso, Budiharto, *“Pemilihan Umum Kepala Daerah Periode 2015/20120 (Studi Politik Hukum Calon Tunggal)”*, Varia Justicia, Volume 12 Nomor 1, Edisi Oktober 2016

Ikhsan Darmawan, *“Peran Dan Startegi Kelompok “Kotak Kosong Dalam Plkada Calon Tunggal Kabupaten Pati Tahun 2017:Studi Pendahuluan”*, Jurnal Wacana Politik, Volume 2 Nomor 1, Edisi Maret 2017

Iza Rumesten RS, *“Fenomena Calon Tunggal Dalam Pesta Demokrasi”*, Jurnal Konstitusi, Volume 13 Nomor 1, Edisi Maret 2016

Lestari Nurhajati, *“Calon Tunggal Dan Komunikasi Politik Partai Dalam Pilkada Serentak 2015 Di Indonesia”*, Jurnal Avant Garde, Volume IV Nomor 1, Edisi Juli 2016

Maryam NH, *“Problematika Hukum Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015”*, Lex Renaissance Nomor 1 Volume 1, Edisi Januari 2016

Masyrofah, *“Arah Perubahan Sistem Pemilu Dalam Undang-Undang Politik Pasca Reformasi”*, Jurnal Cita Hukum, Volume 1 Nomor 2 , Edisi, Desember 2013

- Muhammad Mahrus Ali, *“Tafsir Sistematis Untuk Pilkada Demokratis”*, Majalah Konstitusi Nomor 104, Edisi Oktober 2015
- Nur Rosihin Ana, Lulu Anjar Sari P., Lulu Hanafiah, Triya Indra R., *“Menyongsong Pilkada Serentak 2015”*, Majalah Konstitusi Nomor 103, Edisi September 2015
- Nur Rosihin Ana, *“Jangan Tunda Pilkada”*, Majalah konstitusi Nomor 104, Edisi Oktober 2015
- Pratikno, *“Calon Independen, Kualitas Pilkada Dan Pelembagaan Parpol”*, Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Volume 10 Nomor 3, Edisi Maret, 2007
- Veki Edizon Tuhana, Pawito, Mahendra Wijaya, *“Komunikasi Politik Pasanagan Calon Tunggal Terhadap Perilaku Memilih Masyarakat Kafamenanu Pada Pilkada 21015 Di Kabupaten TTU Provinsi NTT”*, Yustisia, Volume 5 Nomor 2, Edisi Mei-Agustus 2016
- Wafia Silvi Dhesinta, *“Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Konsep Demokrasi (Analisa Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blitar 2015)”*, Jurnal Jentera, Volume 1 Nomor 1, Edisi Juni 2017
- Yusri Munaf, *” Implikasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Pada Tahun 2016 Dalam Perkembangan Demokrasi Di Indonesia”*, Asian Journal Of Environment, Volume 1 Nomor 1, Edisi September 2017
- Zaki Ulya, *“Pergulatan Politik Menjelang Pemilihan Umum Serentak 2019”*, Majalah konstitusi Nomor 103, Edisi September 2015.

#### **D. Internet**

<http://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yurdis.html>, diakses pada 21 Maret 2018.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan\\_kepala\\_daerah\\_di\\_Indonesia#cite\\_note-1](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_kepala_daerah_di_Indonesia#cite_note-1) diakses pada 24 juli 2018

<https://news.detik.com/berita/1961693/dulu-pilkada-lalu-pemilukada-kini-pilgub>, diakses pada 24 juli 2018